

Judul : Presiden bersikap dingin
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

12 | Bisnis Indonesia Jumat, 22 September 2017

► PANSUS HAK ANGKET KPK

Presiden Bersikap Dingin

JAKARTA — Istana tidak ingin terjebak masuk dalam permainan yang dikemas Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Segala bentuk keputusan yang diambil oleh alat kelengkapan parlemen itu, sepenuhnya merupakan kewenangan DPR.

Irene Agustine, John A. Oktaveri S.
Lingga S. Wianaga
redaksi@bisnis.com

Menjawab pertanyaan wartawan se usai membuka Indonesia Business & Development Expo pada Rabu (20/9), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dengan proses yang sedang berlangsung di DPR.

Apalagi, Pansus Hak Angket terhadap KPK sempat menebar wacana untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi guna melaporkan temuan selama proses kerja pansus berjalan.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR, semua harus tahu," ujarnya.

Presiden Jokowi terlihat lebih mendukung upaya untuk memperkuat KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, Presiden Jokowi sempat memberi apresiasi atas kerja KPK yang tak pernah kendur dalam menangani kasus korupsi.

Satu hal yang sempat menjadi perhatian Presiden adalah adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK secara beruntun kendati lembaga itu tengah digoyang secara politik oleh parlemen.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Amanat Nasional

(PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Jokowi karena hal itu akan menarik-narik Presiden ke lingkaran Pansus.

"Pansus kalau sudah punya hasil ya sudah. Jangan dikit-dikit Pak Presiden," ujar Zulkifli, Rabu (20/9).

Dia juga berharap Pansus tidak perlu memperpanjang masa kerja yang akan selesai pada 28 September.

Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK akan terus mendesak lembaga antirasuah itu untuk bertemu setelah gagal menggelar rapat pada Rabu (20/9).

Rencana rapat mendapat penolakan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPK, DPR, DPD, dan DPRD atau MPR.

Hal itu terkait legalitas Pansus yang dianggap KPK melanggar regulasi tersebut.

Anggota Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya menghormati keputusan pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Akan tetapi, menurutnya Pansus melalui ketua

pimpinan DPR untuk mendirikan ketua KPK.

Bahkan, politisi Partai Nasdem yang duduk di Komisi III DPR itu mengatakan masa kerja Pansus harus diperpanjang hingga mendapatkan klarifikasi dari KPK.

"Pansus pada 28 September akan tetap membacakan [hasil temuan Pansus] di paripurna dan akan kami minta kepada pimpinan DPR untuk memperpanjang masa kerja Pansus sesuai undang-undang," katanya, Rabu (20/9).

Anggota Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Arteria Dahlan mengatakan pimpinan KPK diharapkan bersedia memenuhi panggilan pihaknya sebelum 28 September. Dia menyebut hal tersebut agar tak mencederai tatanan norma hukum.

Bahkan menurutnya, pihaknya sudah melayangkan pemanggilan

kedua untuk lembaga antirasuah tersebut.

Dia menyatakan KPK tidak menghormati instrumen parlemen tersebut saat menolak untuk melakukan pertemuan sebagai bentuk klarifikasi.

Seperti diketahui, sebelumnya Pansus telah membeberkan temuan dugaan pelanggaran KPK. Namun sampai saat ini sifat temuan dugaan penyimpangan itu masih sepihak karena KPK masih enggan bertemu Pansus.

"Kami berharap sebelum 28 September 2017 KPK bisa memenuhi panggilan. Ini bisa menjadi momen untuk klarifikasi," ujarnya.

Politisi PDIP itu menyayangkan sikap KPK yang mempertanyakan status pansus. Menurutnya, pansus adalah alat kewenangan dewan yang sudah memiliki legitimasi melalui paripurna. ²

